

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Penasihat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pengarah** : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
(Editor)
- Anggota Dewan Redaksi** : 1. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
(Section Editor) 2. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
4. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
5. Haryono, S.Sos, M.H.
6. Imam Lukito, S.T., M.H.
7. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si.
- Redaksi Pelaksana** : Fitriyani, S.H., M.Si.
Sekretaris : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Asmadi, S.H.
- Tata Usaha** : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. B. Lora Christyanti, S.IP.
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** 1. Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)
2. Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)
3. Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)
- Alih Bahasa** : Harry Fonte Sugiarto
(Interlingua Translation Centre)

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com
ejournalkebijakan@gmail.com

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah menelaah naskah sehingga dapat diterbitkan.

1. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM.,M.H.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

2. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
Universitas Sriwijaya

3. Dr. Hardianto Djanggih,
Universitas Tompotika Luwuk

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (ARTICLES)

1. Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 123-138
Ahmad Sanusi
2. Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana
Yang Memiliki Kartu Pengungsi Unhcr Dalam Perspektif Keimigrasian 139-164
M. Alvi Syahrin, Setiawan Saputra
3. Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya 165-184
Endra Wijaya, Mochamad Firmansyah Roni
4. Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum
Dalam Rangka Mendukung Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional 185-200
Ahmad Jazuli
5. Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan
Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum 201-228
Ayu Ningsih Faisal Adwani
6. The Formulation Impact Of Investment-Hampering Regional Regulations Investment ...229-244
Ray Ferza , Moh. Ilham A Hamudy , M S Rifki

TINJAUAN HUKUM (REVIEW)

7. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 245-264
Pramella Yunidar Pasaribu Bobby Briando

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 13 Nomor 1 Bulan Maret 2019 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Hukum dan Peradilan, serta Keimigrasian yang terbit kali ini. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM serta dari Institusi / Akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

HALAMAN KOSONG

Volume 13, Nomor 2, Juli 2019

**p-ISSN 1978 - 2292
e-ISSN 2579 - 7425**

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

HALAMAN KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ahmad Sanusi (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Evaluation Of Convicts Development In Open Correctional Institutions

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019, Page 123-138.

The philosophy of social reintegration which is the background of the Correctional System in principles emphasizes the humanity aspect for the purpose of reintroducing the prisoners to the community. The purpose of this article is to review and analyze the provisioning processes of the convicts as well as the problems the Open Correctional Institution of Kendal has encountered. The research uses mixed methods, using the qualitative and quantitative data. The results of the research show that the transfer process, to an open prison, of the prisoners who are serving assimilation term has not been in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018 and the Circular Letter of the Director General of Corrections No. PAS-PK.01.01.02-100 of 2013. This, according to the source, transfer of prisoners to the open prison has been more due to the instructions of the superiors or at the request of the open prison as the correctional institution has still been vacant / underoccupied. According to the data, the numbers of employees and the convicts has not been proportional (4: 1), meaning that 4 employees serve only 1 prisoner. Based on the facts above, the concept of social reintegration in an open correctional institution has not been implemented optimally. Consequently it is necessary to revise the Government Regulation No. 31 of 1999 regarding Counseling and Development of Prisoners, in particular article 9 paragraph (2) that provides for clear limitations of authorities between open correctional institutions and regular correctional institutions in carrying out the second stage of development program / assimilation processes.

Keywords: *encouragement; convict; open prison.*

M. Alvi Syahrin (Imigration Polytechnic), Setiawan Saputra (Office of East Jakarta Immigration Class I)

Legal Actions On Ex-Convict Foreigners Holder Of Unhcr Refugee Card From The Immigration Point Of View

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019 Page 139-164

Migrations of asylum seekers and refugees into Indonesian territory has no longer been through the traditional patterns, but transactional ones. They enter the country using official documents and clear the official Immigration Checkpoints, and further register with UNHCR to get the status of asylum seekers and refugees. The status has often been misused for certain purposes. They consider themselves as legally immune from the laws (the immunity right) from the positive laws of a country, including to commit a crime in Indonesia. The formulation of the problem reviewed in this paper is the legal action against the foreign ex-convict holding an UNHCR refugee card from the immigration point of view: Case Study of Ali Reza Khodadad. The research is a normative legal research that is qualitative in nature with mixed logic thinking (deductive and inductive). From the research one can find the following legal facts: the refugee card provides terms and conditions and one of them is the requirement for the cardholders to comply with the applicable laws and regulations in Indonesia. Ali Reza Khodadad may be subjected to the immigration administrative measures in the form of deportation in accordance with Article 75 connected with Article 78 paragraph (3) of Law No. 6 of 2011 regarding Immigration, since he has committed a criminal act of narcotics abuse. Ali Reza Khodadad must be deported without necessarily observing his refugee status. This is a manifestation of the concept of state sovereignty.

Keywords: *convict; foreigners; refugees; immigration*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Endra Wijaya (Faculty of Law Pancasila University), Mochamad Firmansyah Roni (Kutai Barat District Court)

The Practices Of Village Financial Management And Influencing Factors

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019, Page 165-184.

By the issuance of the Law No. 6 of 2014 regarding Villages, each village now has the power to regulate and manage their local community affairs by itself, and also has a large source of income for the purpose of village development. The funds must be managed properly in accordance with the good principles of village financial management and applicable laws and regulations, however in practices it is not easy to do that optimally. This research deals with the problems in the realization of the village financial management and accountability, by taking the village of Cilebut Timur, West Java, as an example. The research also reviews the problems that are usually faced in the implementation of the good financial management and accountability of the village. The research uses empirical research method. The researcher made some interviews in order to collect relevant information. This research concludes that, in principle, the village financial management and accountability in Cilebut Timur Village have been operating well, but there are still some obstacles or defects, among others, delay in the ratification of the Village Budget of Revenue and Expenditures (APBDes), as well as the delay in submitting the accountability report related to the Budget realization. The socialization to the public regarding the accountability in correctly and accurately use of the money by the Village Government has also been low. The practices of the village financial management has been also encountering some obstacles as there are still some parties who are "strongly suspected" of asking for "tribute money."

Keywords: *accountability; village finance; village government.*

Ahmad Jazuli (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

The Urgency For Establishment Of Functional Position Of Legal Documenter To Support National Legal Documentation And Information Network

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019, Page 185-200.

Documentation is one link in the cycle of establishment of science and knowledge. Well-administered and organized legal documents and information in an information network system of national scale should have been a part of the administration of good, clean and responsible governance to meet the demands of the people. This research is made with the purposes of identifying and analyzing the legal aspects in establishing the functional position of legal documenter and readiness of the encouraging agencies in the implementation of the development of the functional position of a Legal Documenter. Using descriptive analysis approach, the results of this review demonstrate that the establishment of the functional position must consider the criteria set out in Article 70 of the Government Regulation No. 11 of 2017 regarding Civil Servants Management; The National Legal Development Agency as the party responsible for developing the National Legal Information and Documentation Network has taken preparatory steps for the establishment of the functional position of legal documenter.

Keywords: *establishment; legal documenter; national law.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ayu Ningsih, Faisal, Adwani (Faculty of Law Syiah Kuala Banda Aceh University)

Legal Position Of Notary As A Mediator In Notary-Related Dispute In Connection With The Legal Counseling Obligation

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019, Page 201-228.

A notary is authorized, and obliged at the same time, to provide legal counseling to ensure legal certainty of the deeds made by him/her. Moral, carefulness, prudence are the main factors a notary must have to avoid abuse of power that may cause harm to the other parties. In practices, some notaries have failed in providing sufficient legal explanation to the parties in his/her deed, giving a rise to some disputes, while in which case the notary should have served as a fair and impartial mediator. The purpose of this research is to elaborate the legal consequences of the deeds the making of which are not preceded by legal explanation and to elaborate the position of the notary in the dispute mediation. This research employs normative legal approach, using primary, secondary and tertiary legal materials. Data are collected by means of literature study research, field research in the form of interviews and legal materials processing, and the legal materials are analyzed qualitatively. The results of the research demonstrate that the notary who acts as a mediator cannot be held legally accountable, because the mediator is a neutral and impartial third party. dan profesi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan/kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan notaris. There is no restriction for the notaries to serve as mediators, since a mediator is not a state official, high state institution and does not conduct state administration. The status as a mediator cannot be classified as acting in a capacity as a civil servant, lawyer, State-owned / Region-owned Enterprises director / employee, and it is not a status that is against the religious, decency / moral norms, that may prejudice to the honor of a notary. Suggestion, the notary must provide professional legal counseling/explanation to avoid any future disputes and claims against the notary. Notaries must observe the code of ethics, moral, impartiality in the mediation process. The Indonesian Notary Association needs to develop mechanisms and limitations on mediation a notary may serve.

Keywords: *notary; legal counseling; mediation.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ray Ferza, Moh. Ilham A Hamudy, M S Rifki, (Research and Development Agency (BPP) of the Ministry of Home Affairs)

The Formulation Impact Of Investment-Hampering Regional Regulations Investment
Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019, Page 229-244.

After the ruling of the Constitutional Court (MK), Ministry of Home Affairs (MoHA) and the Provincial Government can no longer revoke the problematic Regional Regulation (Perda) via an executive review. This situation, would increase the difficulty for MoHA to revise the investment-hampering regional regulations. The problematic Regulations includes of Karawang District's Perda No.1 of 2011 on the Management of Man Power and Bandung City's Perda No. 19 of 2012 on Disturbance Permit and Charges. Therefore, this study seeks to have a general understanding of the two regulations, the factors that influence the formulation, and to establish a guideline for the formulation of an ideal regional regulation. To achieve those objectives, this research used the descriptive qualitative method. The results of the study reveal that the formulation of regional regulation process is plagued by problems such as the absence of Academic Papers, the insufficient stakeholders' involvements, the lack of monitoring by the provincial government on the district/municipal regulation formulation process, lack of understanding of investment principles and confusion with the regional government control function. The various factors that cause the issuance of problematic regulations are, among others, the central government's regulatory packages, sociological elements, political elements, multi-interpretation in understanding the central government's regulation, as well as the fiscal capacity of the region. Therefore, the guidance of the Ministry of Home Affairs in supervising the regional government during the formulation process of districts/ municipal regulation related to investment is very much needed.

Keywords: *formulation; perda; regional regulation investment; regional government.*

Pramella Yunidar Pasaribu, Bobby Briando (Immigration Polytechnic)

Internalizing Pancasila Values In Preparing The Code Of Ethics Of The Government Internal Auditors (Apip)

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019, Page 245-264.

The background of the preparation of this article has been the author's concern on the fading values of Pancasila in all aspects of this country's life. The values seem also fading away from the spirits of the state's civil servants, especially those in the Government internal control agencies. The Code of Ethics of the Indonesian Internal Auditors that should have adopted the Pancasila spirit turns to be far away from these values in its implementation. This article uses qualitative methods with a literature study approach. The conclusion demonstrates that the Government's Internal Auditors must uphold the noble values of Pancasila in the performance of their duties and functions including in drafting their own code of ethics. The author suggests that the code of ethics of the internal auditors of the government must put the Pancasila values, which are in fact the identity of the Indonesians, prevail over, and without necessarily adopt in full the, the foreign code of ethics.

Keywords: *internal APIP; code of ethics; pancasila values.*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Ahmad Sanusi (Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI)

Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2019, Hal 123-138.

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan kendala apa saja yang dihadapi lembaga pemasyarakatan terbuka. Metode penelitian yang digunakan *mixseds method* yakni menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa proses pemindahan narapidana ke lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Hal ini berdasarkan narasumber, pemindahan narapidana ke lapas terbuka lebih banyak dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan permintaan dari pihak lapas terbuka akibat kekosongan/kekurangan hunian di lapas terbuka. Berdasarkan data jumlah pegawai dan warga binaan tidak *rational* (4:1) artinya 4 orang pegawai melayani 1 warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan fakta di atas, maka konsep reintegrasi sosial pada lembaga pemasyarakatan terbuka belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pasal 9 ayat (2) yang memberikan kejelasan wewenang antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan terbuka dalam melaksanakan program pembinaan lanjutan tahap kedua/asimilasi kepada Lapas Terbuka.

Kata Kunci : pembinaan; narapidana; lembaga pemasyarakatan terbuka.

M. Alvi Syahrin (Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) Setiawan Saputra (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur)

Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi Unhcr Dalam Perspektif Keimigrasian

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2019, Hal 139-164.

Migrasi pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia tidak lagi melalui pola tradisional, tetapi transaksional. Mereka masuk menggunakan dokumen resmi dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, lalu mendaftarkan diri ke UNHCR untuk mendapatkan status pencari suaka dan pengungsi. Sering kali status tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Mereka menganggap dirinya kebal hukum (hak imunitas) dari aturan positif suatu negara, termasuk melakukan tindak pidana di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana tindakan hukum terhadap orang asing mantan narapidana yang memiliki kartu pengungsi UNHCR dalam perspektif keimigrasian: Studi Kasus Ali Reza Khodadad. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa fakta hukum sebagai berikut. Dalam ketentuan yang tertera pada kartu pengungsi, dicantumkan kewajiban bagi setiap pemegang kartu ini untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ali Reza Khodadad dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan tindakan deportasi terhadap Ali Reza Khodadad harus dilakukan tanpa melihat status pengungsinya. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan negara.

Kata Kunci: narapidana; orang asing; pengungsi; UNHCR; keimigrasian.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Endra Wijaya (Fakultas Hukum Universitas Pancasila), Mochamad Firmansyah Roni (Pengadilan Negeri Kutai Barat)

Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2019, hal 165-184.

Dengan diaturnya desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini desa memiliki beberapa wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat, dan memiliki sumber pendapatan yang besar pula untuk pembangunan desa. Besarnya dana tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya hal itu tentulah tidak mudah untuk dijalankan secara maksimal. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan mengambil contoh di Desa Cilebut Timur, Jawa Barat, termasuk mengkaji pula persoalan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar. Praktik pengelolaan keuangan desa juga mengalami hambatan karena masih adanya pihak-pihak tertentu yang justru “diduga kuat” meminta “jatah upeti.”

Kata Kunci: akuntabilitas; keuangan desa; pemerintah desa.

Ahmad Jazuli (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)

Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum Dalam Rangka Mendukung Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2019, Hal 185-200.

Dokumentasi adalah mata rantai dalam lingkaran penciptaan ilmu pengetahuan. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aspek hukum pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum dan bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum. Dengan pendekatan deskriptif analisis, hasil kajian ini menyatakan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus mempertimbangkan kriteria yang diatur pada pasal 70 Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi Pembina Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional telah melakukan langkah-langkah persiapan pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum.

Kata kunci: pembentukan; dokumentalis hukum; hukum nasional.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan**

Ayu Ningsih Faisal Adwani (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)

Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2019, Hal 201-228.

Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum untuk menjamin kepastian hukum akta. Moralitas, ketelitian, kehati-hatian merupakan faktor utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktek ditemukan, notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sehingga terjadi sengketa, ada notaris yang menjadi mediator. Tujuan penelitian menjelaskan akibat hukum akta yang tidak didahului dengan penyuluhan hukum, menjelaskan kedudukan notaris dalam mediasi sengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dalam bentuk wawancara, teknik pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan notaris yang bertindak sebagai mediator tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, karena mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Tidak ada larangan bagi notaris menjadi mediator, karena mediator bukanlah pejabat negara, lembaga tinggi negara, tidak melaksanakan administrasi negara, profesi mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN/D, dan profesi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan/kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan notaris. Saran, notaris wajib memberikan penyuluhan hukum secara profesional untuk menghindari sengketa dan gugatan kepada notaris. Notaris harus memperhatikan etika, moral, ketidakberpihakan dalam proses mediasi. Ikatan Notaris Indonesia perlu menyusun mekanisme dan batasan mediasi yang boleh dilakukan oleh notaris.

Kata kunci : notaris; penyuluhan hukum; mediasi.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Ray Ferza, Moh. Ilham A Hamudy, M S Rifki, (Research and Development Agency (BPP) of the Ministry of Home Affairs)

The Formulation Impact Of Investment-Hampering Regional Regulations Investment
Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 2, July 2019, Page 229-244.

After the ruling of the Constitutional Court (MK), Ministry of Home Affairs (MoHA) and the Provincial Government can no longer revoke the problematic Regional Regulation (Perda) via an executive review. This situation, would increase the difficulty for MoHA to revise the investment-hampering regional regulations. The problematic Regulations includes of Karawang District's Perda No.1 of 2011 on the Management of Man Power and Bandung City's Perda No. 19 of 2012 on Disturbance Permit and Charges. Therefore, this study seeks to have a general understanding of the two regulations, the factors that influence the formulation, and to establish a guideline for the formulation of an ideal regional regulation. To achieve those objectives, this research used the descriptive qualitative method. The results of the study reveal that the formulation of regional regulation process is plagued by problems such as the absence of Academic Papers, the insufficient stakeholders' involvements, the lack of monitoring by the provincial government on the district/municipal regulation formulation process, lack of understanding of investment principles and confusion with the regional government control function. The various factors that cause the issuance of problematic regulations are, among others, the central government's regulatory packages, sociological elements, political elements, multi-interpretation in understanding the central government's regulation, as well as the fiscal capacity of the region. Therefore, the guidance of the Ministry of Home Affairs in supervising the regional government during the formulation process of districts/ municipal regulation related to investment is very much needed.

Keywords: *formulation; perda; regional regulation investment; regional government.*

Pramella Yunidar Pasaribu Bobby Briando (Politeknik Imigrasi)

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2019, Hal 245-264.

Latar Belakang penulisan artikel ini berawal dari kegelisahan penulis pada semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam segenap aspek kehidupan bangsa. Lunturnya nilai-nilai tersebut juga merambah pada kalangan Aparatur Sipil Negara khususnya Pengawas Internal Pemerintah. Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia yang sejatinya harus memiliki ruh Pancasila ternyata dalam implementasinya sama sekali jauh dari nilai-nilai tersebut. Penulisan artikel menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Kesimpulan menunjukkan bahwa Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam tugas dan fungsinya termasuk dalam menyusun kode etik. Saran penulis adalah agar kode etik auditor internal pemerintah harus lebih mengedepankan nilai-nilai pancasila yang sejatinya merupakan jati diri bangsa Indonesia tanpa harus mengadopsi secara penuh kode etik asing.

Kata kunci: APIP; kode etik; nilai pancasila.